

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Kerja sama kedua negara antara Taiwan dengan Indonesia mengalami banyak proses. Tetapi kedua negara semakin erat dalam kerja samanya. Kerja sama Indonesia dan Taiwan meliputi kerja sama banyak bidang. Bidang-bidang tersebut antara lain kerja sama perdagangan dan investasi, kerja sama dalam bidang ketenagakerjaan, kerja sama dalam bidang budaya dan pendidikan, kerja sama dalam bidang pertanian dan masih banyak lagi. Taiwan bahkan melakukan investasi ke Indonesia yaitu investasi kendaraan listrik.

Meski telah memiliki banyak kerja sama, namun Taiwan dan Indonesia sebenarnya tidak memiliki hubungan diplomatik. Hal ini dikarenakan Tiongkok yang memiliki peraturan luar negeri yang disebut dengan “One China Policy” yang mengharuskan negara harus memilih bekerja sama dengan Tiongkok atau Taiwan. Meski begitu, Taiwan dan Indonesia tetap bekerja sama dengan menjadi partner dagang dan mendirikan kantor dagang di wilayah masing-masing. Taiwan mendirikan TETO di Indonesia dan Indonesia mendirikan IETO di Taiwan. Hubungan Taiwan dan Indonesia semakin erat dengan banyaknya kerja sama yang dilakukan oleh keduanya.

Taiwan adalah negara tujuan kedua terbanyak yang dituju oleh PMI. Oleh karena itu perlu sekali regulasi dan kerja sama yang bertujuan untuk melindungi para pekerja migran – PMI. Para PMI adalah kelompok yang rentan dieksploitasi, mendapatkan kekerasan baik verbal, fisik, maupun secara seksual, menjadi korban perdagangan manusia, dan masih banyak lagi. PMI merupakan pahlawan devisa negara di Indonesia. Bahkan menurut CNN (2018) PMI menyumbang sekitar Rp 70 triliun devisa negara. PMI juga merupakan solusi terhadap pengangguran yang tinggi di Indonesia. Dengan begitu, banyak pihak yang dapat diuntungkan

karena PMI. Pihak pertama adalah PMI yang mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang lebih besar daripada bekerja di dalam negaranya dengan profesi yang sama. Hal inilah yang mendorong para PMI bekerja di luar negaranya. Pihak kedua yang diuntungkan adalah Indonesia karena devisa negara yang dialirkan oleh para PMI. Pihak ketiga yang diuntungkan adalah Taiwan sendiri karena mendapatkan tenaga kerja. Tidak hanya Taiwan, tetapi juga para majikan-majikan di Taiwan yang membutuhkan pekerja.

Karena hal-hal tersebut pada akhirnya mengharuskan Taiwan dan Indonesia bekerja sama untuk melindungi para PMI. Taiwan dan Indonesia menandatangani nota kesepahaman tentang perekrutan, penempatan, dan perlindungan PMI di Taiwan pada tahun 2018. Tujuan dari kerja sama nota kesepahaman ini adalah untuk melindungi para PMI yang rentan menjadi korban dalam hal apapun yang membahayakan eksistensi para PMI.

Kerja sama ini selain untuk melindungi dan menjadikan negara sebagai otoritas tertinggi peduli terhadap warga negaranya atau individu yang berada di wilayahnya, ini juga sebagai diplomasi ekonomi. Karena Indonesia dan Taiwan menjadi partner dagang, maka penting untuk keduanya tetap melakukan diplomasi ekonomi dengan cara melakukan kerja sama menandatangani nota kesepahaman.

4.2 Saran

Pemerintah dapat melakukan evaluasi yang ada di lapangan mengenai implementasi peraturan ataupun hal-hal yang terdapat di dalam nota kesepahaman. Pemerintah juga seharusnya mengevaluasi apakah regulasi berjalan sesuai apa yang tertulis ataukah hanya sebatas perjanjian saja. Regulasi tidak hanya dibuat tetapi seharusnya juga dijalankan dan diterapkan di lapangan. Akan menjadi sia-sia regulasi jika tidak ada pengimplementasian dari pemerintah.

Selain itu pemerintah dapat memperbanyak kerja sama dengan lembaga non-pemerintahan untuk melakukan pelatihan-pelatihan yang berguna untuk menambah keterampilan para pekerja migran. Pemerintah memang sudah melakukan beberapa kerja sama baik bersama lembaga non-pemerintahan ataupun bersama pemerintahan Taiwan, tetapi kerja sama-kerja sama tersebut dapat diperbanyak lagi agar para PMI dapat lebih berdaya.

Pekerja migran adalah pekerja yang rawan tereksplorasi karena beberapa hal yang mana itu memberikan celah kepada para majikan untuk mengeksplorasi para pekerja. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa pekerja migran terutama dari Indonesia masih memiliki kesadaran yang kurang atas hak-hak mereka dan pekerjaan apa saja yang harusnya mereka lakukan. Pemerintah dapat memberikan sosialisasi kepada para pekerja agar lebih hati-hati dalam mengerjakan pekerjaan terutama pekerjaan yang ternyata bukanlah tugas mereka tetapi majikan mereka meminta untuk melakukannya. Sosialisasi juga dapat dilakukan oleh lembaga non-pemerintah yang dapat bekerja sama dengan pemerintah untuk melakukan sosialisasi kepada pekerja untuk menjelaskan hak-hak mereka di tempat kerja. Para PMI perlu dan sangat membutuhkan sosialisasi terkait hak-haknya agar dapat lebih tahu dan paham akan hal mana saja yang seharusnya dilakukan. Sosialisasi juga dapat dibarengi dengan sosialisasi melapor ketika hak-haknya telah dilanggar oleh para majikan. Pihak yang melakukan sosialisasi dapat memberikan rekomendasi dan arahan cara melapor.

Hal ini diharapkan dapat memberikan para pekerja migran ruang aman untuk bekerja sesuai bidangnya tanpa harus ada eksploitasi atau ketidaksadaran hak yang telah dilanggar. Agar para pahlawan devisa dapat bekerja secara aman, peran pemerintah dan lembaga non-pemerintahan yang fokus dalam bidang ini perlu ditambah. Negara yang seharusnya sebagai penjamin keamanan untuk warga negaranya yang mana dalam konteks ini adalah pekerja migran dapat terus memberikan garansi keamanan untuk mereka. Timbal balik dan kontrak

sosial antara negara dan warga negaranya harus berjalan dengan baik sehingga dapat tercipta kesejahteraan yang diciptakan oleh kedua belah pihak.